Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Oleh : *Surianti*

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH., M.H

Alamat: Jalan Tamrin No.24, Pekanbaru-Riau

Email: surianti06@gmail.com

ABSTRACT

Environmental pollution caused by waste can be allegedly violating Chapter XV article 39 concerning criminal provisions in the Basic Law on Waste Management. However, the reality of pollution to waste in the Folding Kain village continues to occur and is getting worse. Enforcement of environmental criminal law does not go as it should, this is what proves that law enforcement that should provide a deterrent effect and prevent the occurrence of repetition of criminal acts or similar crimes has not run optimally. The purpose of this thesis research is; First, to determine the application of criminal sanctions against environmental pollution caused by garbage in the village of Lipat kain Kampar Kiri District, Second, to find out the obstacles and efforts faced in addressing environmental pollution caused by garbage in the District of Lipatkain Kampar Kiri District. From the results of the study there are two main problems that can be concluded. First, the application of criminal sanctions against environmental pollution caused by garbage in the Folding Kain Village in Kampar Kiri District is not running properly.

Environmental pollution caused by garbage is regulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, namely in CHAPTER XV article 39, but the application of sanctions carried out by the Environmental Service is still in the form of reprimand and garbage collection, sanctions imposed are not in accordance with the Law or Applicable regulation. Secondly, the obstacles experienced by the Environmental Service in addressing environmental pollution caused by waste are in the form of lack of awareness and knowledge of the residents of Lipat Kain Village on the law and the importance of the environment, the law enforcement factors, lack of personal and professionalism of law enforcement, lack of facilities and infrastructure adequate. And as for the efforts made by the Environmental Service in addressing environmental pollution caused by waste, in the form of coordinating with the Kampar District Resort police, conducting socialization or counseling with the community, establishing good relations with the community, installing banners or appointing, providing the necessary facilities in the case of waste management such as garbage trucks, landfills, and personnel. Researcher's suggestion, First, it is suggested to law enforcement officers to be able to apply the existing rules and the sanctions given are expected to have a deterrent effect on the perpetrators of environmental pollution caused by garbage in order to create a clean and healthy environment. Secondly, it is expected that the Environment Service can implement maximum prevention programs against environmental pollution, and work according to their respective professionalism.

Keywords: *Application of Sanctions - Crime - Trash*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai semua benda, daya, kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹ Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan penambahan produksi pangan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan hidup. Karena terus diperas dan dikuras untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, lingkungan hidup makin rusak dan berkurang kemampuan produktifitasnya.² Dengan ketidakseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran itu sendiri merupakan ketidakharmonisan hubungan manusia dengan alam (bumi) yang sebagian menyangga ketergantungan kita terhadap pola konsumsi yang terus-menerus meningkat jumlahnya atas sumber-sumber alam dan bumi. Potensi kerusakan pada keseimbangan alam yang menyebabkan bumi dapat dijadikan ruang untuk kita hidup, semuanya menunjukkan terus meningkatnya derajat konflik antara peradaban manusia dengan alam.³

Permasalahan yang paling besar bagi lingkungan hidup adalah kurangnya peduli masyarakat terhadap lingkungan itu sendiri, dengan adanya perubahan sosial, yaitu perubahan gaya hidup dan kebutuhan dalam masyarakat yang berlebihan sehingga membuat pencemaran lingkungan semakin pesat. salah satu contoh pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat banyak adalah pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpukan sampah yang terdapat disepanjang

jalan umum di Kelurahan Lipat Kain sangat mempengaruhi aliran sungai dan dapat mencemari sungai yang berada di sekitar tumpukan sampah tersebut, sementara masyarakat Kelurahan Lipat kain masih sangat bergantung dengan sungai Subayang dan sungai Kampar. Ketergantungan masyarakat pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya.

Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lainnya.⁴ Namun akibat dari tumpukan sampah yang berada di jalan raya atau di jalan umum sangat mengganggu masyarakat dan air menjadi tercemar sehingga masyarakat tidak mendapatkan air bersih yang layak. Untuk itu di perlukan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵ Dan larangan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah terdapat dalam BAB XV pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit

¹ Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi:2014, hlm. 1

² Marhaeni Ria Simbo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2012, hlm. 9.

³ Jimly Asshiddiqie, *Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Raja Wali Pres, Jakarta: 2010, hlm. 146.

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 62.

⁵ Helmi, *Hukum Perizinan lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 4.

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah dapat disangkakan melanggar Bab XV mengenai ketentuan pidana dalam undang-undang Pokok Pengelolaan Sampah. Namun kenyataannya pencemaran terhadap sampah di kelurahan Lipat Kain tetap saja terjadi dan semakin hari semakin parah. Penegakan hukum pidana lingkungan tidak berjalan sebagaimana semestinya, terbukti dengan masih banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di jalan-jalan umum yang berada tidak pada tempatnya. Hal inilah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang seharusnya memberikan efek jera dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana atau kejahatan yang serupa belum berjalan dengan maksimal.⁶

Bahwa dalam perkara hukum lingkungan hidup, penegakan hukum pidana tidak hanya sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) tetapi juga sebagai *preimum remedium* atau yang disebut dengan penegakkan hukum pertama. Selama ini sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus pencemaran. Kasus mengenai sampah ini sangat memprihatinkan, sampah akan terus dihasilkan setiap harinya oleh masyarakat sehingga akan menjadi masalah besar jika tidak segera diatasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi : **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap**

Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri?
2. Apakah hambatan dan upaya yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah di Kelurahan Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sendiri khususnya mengenai masalah yang diteliti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dan sumbangan pendapat pada bidang hukum pidana, khususnya oleh aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih mengetahui bahaya dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Sampah
- c. Penelitian ini dapat sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan peneliti bagi almamater Universitas Riau serta kepada seluruh masyarakat

⁶ John N.Gallo, “ Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Chapter 1, 1998, hlm. 6.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Perumusan beberapa para ahli mengenai tindak pidana, yaitu⁷

- a. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakuitu dapat merupakan “*subject*” tindak pidana.
- b. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan tindakan yang dapat dihukum.

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁸

Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum perdata, juga dapat didekati dari instrumen hukum pidana. Beberapa perbuatan yang dilarang atau perbuatan tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, yakni :

- a. Memasukan dan/ atau mengimpor sampah rumah tangga dan/ atau sampah

sejenis sampah rumah tangga dan/ atau sampah spesifik kewilayah kampar

- b. Melakukan pengelolaan sampah tanpa izin dan/ atau pengelolaan tidak sesuai standar perizinan.

- c. Melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya yang telah ditetapkan dan disediakan.

- d. Melakukan pembakaran sampah yang tidak pada prosedurnya

Bahwa dalam perkara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah ini sudah merupakan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-undang. Peneliti bermaksud menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwasanya membuang sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana dan dapat di pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah, yang terdapat dari masyarakat.

- b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah delik agama, misalnya, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat (Penesehat Hukum), dan pihak lembaga kemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah delik agama.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan

⁷ B.Bonsu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Cetakan I, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm. 20

⁸ Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum Vol.3*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 20.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2013, hlm. 8

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah delik agama

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

Penegakan hukum adalah makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakkan hukum materil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahterah.¹⁰ Penyelesaian sengketa dalam hukum pidana lingkungan mengenai sampah dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan berupa mediasi, negosiasi, arbitrase, ataupun pilihan lain dari pihak yang bersengketa. Dan apabila tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka persengketaan dapat diajukan ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun telah menerapkan asas *primus remidium* untuk penerapan sanksi pidana, namun persoalannya serupa sampai kapan tiba saatnya *primus remidium* bakal diterapkan apabila hanya mengedepankan sanksi administrasi, padahal sepatutnya sanksi pidanalah yang diterapkan bagi pelanggar peraturan

perundang-undangan menyangkut lingkungan hidup, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan ini maka hukum pidana merupakan obat terampuh untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yg telah melakukan atau untuk masyarakat yang belum dan ingin melakukan pencemaran lingkungan, masalah sampah ini merupakan masalah kecil namun berdampak besar dan kasusnya selalu berulang-ulang dan tidak ada kepastian hukum dalam hal ini meskipun undang-undang telah tegas menyikapi hal ini namun terbentur dikarenakan penegakan hukum itu sendiri.

Tanggung jawab penyelenggaraan hukum pidana berada di tangan para penegak hukum lokal.¹¹ Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik polri maupun PPNS, jaksa, hakim, lembaga kemasyarakatan, serta advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa. Dalam perbuatan pidana lingkungan hidup terkadang unsur kausalitas sangat sulit dibuktikan. Terhadap bahan-bahan kimia sangat diperlukan *scientific proof* dan sangat diperlukan keahlian khusus serta perangkat laboratorium yang sangat canggih untuk memastikan apakah alam telah tercemar dan atau rusak. Karna kurang sempurnanya *scientific proof* tersebut dapat berakibat gagalnya upaya penegakan hukum karna aparat penegak hukum sangat tergantung pada keterangan ahli ini.¹² Namun apabila telah terpenuhinya unsur formil dan unsur materil dari suatu perbuatan tersebut maka pelaku pencemaran lingkungan, baik perorangan maupun badan hukum dapat disangkakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir

¹⁰ Syahrul Machmud, *Op.cit*, hlm. 163.

¹¹ Earl H. De Long and Fred E. Inbau, "A Law Enforcement Program For The State Of Illinois", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Chapter 1, 1999, hlm. 1.

¹² Syahrul Machmud, *Loc.cit*, hlm. 163.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.¹³

2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya., yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁴
3. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹⁵
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau dilapangan tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kampar Kiri. Peneliti tertarik melakukan penelitian dilokasi tersebut karena masih sangat banyak tumpukan sampah yang berada tidak pada tempatnya.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, yaitu masyarakat Kelurahan Lipat Kain.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷ Dimana peneliti menggunakan Metode Purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang diperoleh dari data yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak berstruktur, yaitu suatu

¹³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm.15.

¹⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Pasal 1 butir 20 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2010, hlm. 119.

wawancara yang tidak disertai dengan daftar perencanaan.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang telah disediakan jawaban-jawabannya. Adapun kuisisioner yang dilakukan ditujukan kepada masyarakat kelurahan lipat kain.

c. Studi kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penerikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam produk perundang-undang selama ini banyak memberikan kesan lebih mengutamakan jenis sanksi pidana dalam sistem pidanaannya. Hampir tidak pernah ditemukan suatu perundang-undangan yang tanpa mencantumkan sanksi pidana didalamnya. Bentuk-bentuk sanksi yang paling banyak diterapkan adalah pidana penjara, kurungan, dan denda. Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.¹⁸ Sanksi itu sendiri merupakan ancaman hukuman, suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat semua perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, terdapat tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu berupa paksaan pemerintahan, uang paksa dan atau pencabutan izin. Sanksi ini lebih menekankan terhadap pelaku yang melakukan pengelolaan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur tentang larangan setiap orang untuk:

- 1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Adapun sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 32.

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap pelaku pencemaran sampah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana sanksi atau ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah diatur dalam pasal 35 yang berbunyi:

- (1) Pengelolaan sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditetapkan dan disediakan dan atau membuang sampah seperti tersebut dalam Pasal 26 ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) hari dan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (4) Setiap orang yang membakar sampah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) hari dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Peraturan dan Undang-undang telah tegas dalam mengatur terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, namun pada kenyataannya bahwa di Kelurahan Lipat Kain penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah tidak berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan sedikitnya sanksi yang diberikan kepada pelaku, bahkan pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah hampir tidak pernah mendapatkan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. Selama ini sanksi yang pernah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah hanya sebatas teguran dan pelaku diberikan hukuman untuk membersihkan sampah yang berada ditempat kejadian tersebut.¹⁹

Hal inilah yang menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat yang akan membuat lingkungan semakin rusak, lingkungan apabila telah rusak atau tercemari, akan sangat merugikan baik bagi negara maupun bagi masyarakat itu sendiri. Lingkungan sangat berperan penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Lingkungan Kelurahan Lipat Kain saat ini sudah mulai tercemari oleh sampah, dimana sampah ini terlihat sudah sangat mengganggu masyarakat sekitar.²⁰

Berdasarkan hasil kuisioner kepada responden, yaitu masyarakat Kelurahan Lipat Kain yang berada disekitar tumpukan sampah. Dari tanggapan responden mengenai apakah pernah mendapatkan sanksi atas pembuangan sampah yang dilakukan dijalan umum Kelurahan Lipat Kain, dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden, 3 orang mengatakan pernah mendapatkan sanksi atas pembuangan sampah yang dilakukan pada sembarangan tempat, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sanksi yang diberikan bukan merupakan sanksi pidana melainkan

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mukhri, sp. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar. Hari Rabu 24 Januari 2018, Bertempat di Dinas lingkungan Hidup Kampar.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sufridayati, sp. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kampar. Hari Rabu 24 Januari 2018, Bertempat di Dinas lingkungan Hidup Kampar.

sanksi teguran, dan 97 orang mengatakan tidak pernah mendapatkan sanksi atas pembuangan sampah yang dilakukan pada sembarangan tempat.

Penjatuhan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektifitas hukum lingkungan itu agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan penegakan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan. Ketidakjelasan dalam penegakkan hukum mengakibatkan pencemaran lingkungan sulit untuk diatasi, hal inilah yang terjadi di Kelurahan Lipat Kain, Pencemaran yang disebabkan oleh sampah yang terjadi di Kelurahan Lipat Kain sangat memprihatinkan hampir setiap harinya masyarakat menghasilkan sampah dan melakukan pembuangan sampah tanpa pengelolaan terlebih dahulu, dan mengakibatkan pencemaran serta kerusakan terhadap lingkungan. Hampir dari seluruh masyarakat Kelurahan Lipat Kain melakukan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya.

Hal ini dapat dilihat dari hasil kuisioner kepada responden, yaitu masyarakat Kelurahan Lipat Kain yang berada disekitar tumpukan sampah, mengenai apakah pernah melakukan pembuangan sampah di jalan umum, dari tanggapan responden diketahui bahwa dari 100 orang responden, sebanyak 82 orang pernah melakukan pembuangan sampah di jalan umum, serta 18 orang mengatakan tidak pernah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat yang tidak pernah membuang sampah di jalan umum, ternyata mereka membuang sampah dibelakang rumah.

Tujuan dari Penegakan hukum itu adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹ Hukum berfungsi mengatur, memberikan kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang.. Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena

hukum lingkungan menempati titik silang antara berbagai bidang hukum klasik.²²

Banyak dari masyarakat Kelurahan Lipat Kain melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya disebabkan karena tidak mau ambil pusing dan ikut-ikutan, hal ini terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden, yaitu masyarakat Kelurahan Lipat Kain yang berada disekitar tumpukan sampah, mengenai apakah yang menyebabkan mereka melakukan pembuangan sampah di jalan umum. Dari tanggapan responden dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden, 54 orang responden mengatakan pembuangan sampah disembarangan tempat dikarenakan tidak mau pusing, dan 46 orang responden mengatakan melakukan pembuangan sampah disembarangan tempat dikarenakan ikut-ikutan saja.

B. Hambatan Dan Upaya Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Sampah Di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri

1. Hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah

Penegakan hukum itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²³ Dalam usaha melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran Lingkungan di Kabupaten Kampar pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar maupun pemerintahan Kelurahan Lipat Kain telah melakukan upaya preventif atau pencegahan, namun pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun pemerintahan Kelurahan Lipat Kain

²² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 52

²³ Nyoman Serikat Jaya Putra, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, hlm. 135.

²¹ Syahrul Machmud, *Loc. cit.*, hlm. 19.

mengalami kendala (hambatan). Adapun hambatan yang dihadapi dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah di Kelurahan Lipat Kain, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum dan pentingnya Lingkungan Hidup.

Kesadaran hukum adalah dimana setiap masyarakat menyadari tentang aturan yang berlaku di dalam masyarakat itu dan melakukan atau mematuhi segala aturan yang berlaku dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Dalam kenyataannya kesadaran hukum dan kesadaran mengenai lingkungan dari masyarakat masih sangat kurang karena pelaksanaan hukum itu sendiri masih kurang tegas, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya tumpukan sampah disepanjang jalan.

2. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum merupakan instansi yang terdepan dalam melakukan penegakan hukum pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat, terutama terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum lingkungan yang kurang profesional, sehingga penanganan mengenai masalah sampah ini tidak efektif. Inilah terkadang yang menyebabkan penegakan hukum itu tidak berjalan dengan baik.²⁴

3. Kurangnya sarana dan prasana

Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses penegakan hukum, penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Kampar terbentur dengan sarana dan prasarana yang masih sangat minim, sehingga menghambat terciptanya pengelolaan yang baik. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan kepastian hukum.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, yaitu dengan cara preventif dan represip.

- a) Melakukan koordinasi dengan kepolisian Resort
- b) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan masyarakat
- c) Menjalin hubungan baik dengan masyarakat
- d) pemasangan spanduk atau plangkat ditempat rawan pembuangan sampah.
- e) Memberikan fasilitas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Raja Wali Pres, Jakarta.
- Bonsu, B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Cetakan I, Usaha Nasional, Surabaya.
- Bram, Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ir Cokroaminoto, Mm. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Hari Rabu 26 September 2018, Bertempat di Dinas lingkungan Hidup Kampar.

Machmud, Syahrul. 2012 *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia; Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ria Simbo, Marhaeni. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Serikat Jaya Putra, Nyoman. 2008. *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Erdianto Efendi, 2012, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum Vol.3*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

John N.Gallo, 1998, " Effective Law-Enforcement The Technique For Reducing Crime", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Chapter 1.